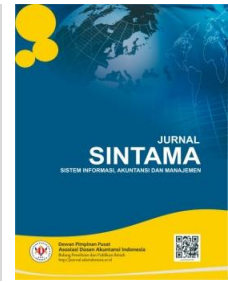




SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

journal homepage:
<https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintama>

E-ISSN 2808-9197



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

Parlindo¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau,
e-mail: parlindoedho@gmail.com

Penulis Korespondensi. Parlindo
e-mail: parlindoedho@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima 16 Mei 2022
Revisi 18 Juni 2022
Diterima 19 Juli 2022
Tersedia Online 18 September 2022

Kata kunci :

Nilai, Pengawasan, Kompetensi,
Teknologi, Intern, Komitmen

ABSTRAK

Objektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru". pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi penelitian ini adalah kepala bagian keuangan, staf sub bagian keuangan, dan PPK (Pejabat Ketatausahaan Keuangan)

Metode Riset. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS Versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji parsial variabel.

Hasil. Berisikan ringkasan singkat tentang hasil dari temuan dari penelitian ini.

Kesimpulan. Berisikan ringkasan singkat tentang kesimpulan yang menjawab tujuan dari penelitian ini serta memuat saran yang dapat digunakan untuk pengembangan selanjutnya.

ARTICLE INFO

Artikel History:

Receive 16 Mei 2022
Revision 18 Juni 2022
Received 19 Juli 2022
Available Online 18 September 2022

Keywords :

Value, Supervision, Competence,
Technology, Internal, Commitment

ABSTRACT

Objective. This study aims to analyze the factors that influence the value of information on the financial statements of the Pekanbaru City Government. at the Pekanbaru City Regional Apparatus Organization. This study uses quantitative methods using primary data obtained from questionnaires. The population of this study is the head of the finance department, staff of the finance sub-section, and PPK (Financial Administration Officer).

Research Method. The sample in this study was 117 respondents. The data were processed using multiple linear regression analysis with the help of SPSS Version 25. The results showed that the partial test of the Regional Financial Supervision variables.

Conclusion. Contains a brief summary of the conclusions that answer the objectives of this study and includes suggestions that can be used for further development.

© 2022 SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

1. PENDAHULUAN

Sektor publik dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Oleh karena itu sektor publik sangat luas, maka dalam penyelenggaraan sering diserahkan ke pasar. Namun pemerintahan tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi. Bahkan beberapa bidang sektor publik dikelola dengan menggunakan sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal (charities).

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government governance), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah Riau khususnya Kota Pekanbaru masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Kota Pekanbaru merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Disamping itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK beberapa tahun terakhir namun Fitra Riau melalui rilis yang diterima Goriau.com, Ahad (20/09/2020), mengatakan opini tersebut bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan, karena ditemukan cukup banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang dapat berakibat pada kerugian negara, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, juga ditemukan adanya penyimpangan administrasi yang tidak menimbulkan dampak finansial. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, total dalam APBD Riau 2020 yang menjadi temuan BPK mencapai Rp 91 Miliar lebih. Angka ini bahkan mengalami peningkatan dari 2019 lalu yang hanya Rp27 miliar lebih. Hal ini berdasarkan data di LHP BPK, jika ditotal dalam temuan Audit LHP BPK khusus di provinsi saja TA 2020 berjumlah Rp 91,204 Miliar. Terdiri dari temuan yaitu berpotensi kerugian sebesar Rp81,6 Miliar, kekurangan penerimaan sebesar Rp1,9 Miliar dan penyimpangan administrasi sebesar Rp7,6 Miliar. Temuan tersebut jika dilihat dari tahun sebelumnya di tahun 2019 yang mana kepala OPD juga masih yang sama. Jika di lihat dari data sepanjang tahun 2019-2020 potensi temuan yang paling besar adalah di tahun 2020 sebesar Rp91,204 Miliar sedangkan tahun 2019 hanya Rp27,504 Miliar. Menanggapi hal ini Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Taufik mengatakan, ketidakpatuhan pimpinan OPD atau eselon II dalam mengelola anggaran belanja bisa disimpulkan sangat buruk atas kinerja dua tahun ini. "Seharusnya pimpinan OPD bisa meminimalisir kinerja dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi temuan yang berulang oleh karena itu maka hal ini menjadi poin utama untuk direvisi bagaimana tingkat kepatuhan OPD dalam mengelola keuangan," ujar Taufik, Jum'at (1/10/2021) Sementara itu dari data yang ada di BPK, banyak temuan yang terdapat pada instansi OPD tahun 2020.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Riau tidak menunjukkan kinerja baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran, sebagaimana berdasarkan kasus yang ditemukan selalu berulang-ulang setiap tahunnya, terutama yang berdampak pada kerugian negara. Berdasarkan jumlah kasus yang ditemukan dari tahun ke tahun, justru terjadi peningkatan.

Dengan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan dalam dua tahun terakhir, menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mampu memperbaiki kinerjanya, padahal temuan-temuan tersebut telah menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah setiap tahun untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintah dan perbaikan tata kelola anggaran. Pada kasus ini Pemerintah daerah Kota Pekanbaru berkontribusi sebanyak 8% atas kerugian negara di Provinsi Riau. Berdasarkan temuan audit LKPD tahun 2020 tersebut. Terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Pemda di Riau pada tahun 2020, BPK perlu melakukan review kembali atas penilaian yang diberikan kepada masing-masing Pemda di Riau, mengingat jumlah kasus dan dampak kerugian yang ditimbulkan cukup besar, baik terhadap yang menimbulkan kerugian negara, potensi kerugian, kekurangan penerimaan daerah dan adanya kesalahan administrasi (rri.co.id 1/10/2021).

2. STUDI LITERATUR

Hasil penelitian yang dilakukan Patras (2017), menemukan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wayan (2018) menemukan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khadijah (2020) menemukan sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Patras (2017) menemukan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifandi (2018) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2017) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan Rahmasari (2017), memberikan temuan bahwa kepatuhan perundang undangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang harus diperhatikan yang menjadi norma dan prinsip dasar yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pengawasan membantu tercapainya tujuan yang diharapkan. Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertib nya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimal nya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Rifandi, 2018) yang menyebutkan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ke-1 sebagai berikut

H1: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga nilai informasi laporan keuangan menjadi buruk. Berdasarkan teori keagenan (agency theory) dimana kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini adalah berkaitan dengan pihak agen yang merupakan pihak pembuat laporan keuangan, haruslah memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan, seperti telah mengerti peran dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan, menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang semestinya, mendapatkan pelatihan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan

dan jika perlu sudah berpengalaman dalam bidang akuntansi sehingga dapat dengan mudah dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan yang signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Khadijah, 2020). Yang menyebutkan sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ke-2 sebagai berikut.

H2: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dengan bantuan alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti adanya perangkat keras komputer dan perangkat lunak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan lebih tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Imelda Latjandu, dkk(2011), sedangkan menurut Donnelly(1994) pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data memiliki keunggulan dari sisi kecepatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan yang signifikan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Wayan, 2018). Yang menyebutkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ke-3 sebagai berikut.

H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Semakin efektifnya pengendalian internal akan menyebabkan peningkatan kinerja pegawai dan instansi pemerintah dengan mendorong pengambilan keputusan dan pengendalian aktivitas keuangan oleh para manajer secara lebih baik. Namun sebaik apapun struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Mutu dan kapasitas sumber daya manusia dari karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Jika instansi pemerintah memiliki pegawai yang berkompeten dalam teknologi informasi dan jujur, serta bertanggung jawab pada bidangnya, maka instansi pemerintah tersebut akan mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan yang signifikan antara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Wayan, 2018). Yang menyebutkan bahwa Pengendalian internal berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ke-4 sebagai berikut.

H4: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan LHP BPK Semester 1 Tahun 2016, temuan audit penyimpangan kepatuhan terhadap perundang undangan dapat berupa ketidak patuhan entitas terhadap ketentuan perundang-undangan sehingga mengakibatkan: kerugian negara/ daerah/ perusahaan, potensi kerugian negara/ daerah/ perusahaan, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidak hematian, ketidak keefisienan dan ketidak efektifan. Ketidak patuhan yang bersifat material dan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan menjadi salah satu kriteria dalam penentuan opini.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan antara kepatuhan terhadap perundang-undangan dengan Nilai Informasi Laporan keuangan. Hal Ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan Rahmasari (2017), memberikan temuan bahwa kepatuhan perundang undangan

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ke-5 Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ke-5 sebagai berikut.

H5: kepatuhan terhadap perundang undangan berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada teori keagenan dimana Manajer yang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi walaupun dalam kondisi lingkungan yang tidak pasti, maka akan memiliki pandangan yang positif dan lebih berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah baik. Komitmen organisasi yang kuat dalam diri individu akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan dan kepentingan organisasi sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi dalam hal ini kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dalam organisasi dimana mereka bekerja untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan organisasinya dalam hal ini nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan antara Komitmen Organisasi dengan Nilai Informasi Laporan keuangan. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif (2017), memberikan temuan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ke-6 sebagai berikut.

H6: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

3. METODE RISET

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yakni penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan(Sugiyono, 2012).

Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber ahli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini diperoleh dari hasil jawaban para responden atas kuesioner yang diajukan dimana responden diperkenankan memberikan jawaban yang dianggap paling sesuai dan telah diisi oleh sampel-sampel. Kelebihan penggunaan sumber data primer adalah peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan karena data yang tidak relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi. Data primer pada penelitian ini adalah hasil angket yang disebarkan kepada seluruh OPD Kota Pekanbaru.

Metode Analisis Data

Model yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan cara mendeskripsikan data sampel yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum. Yang bertujuan untuk mengetahui rata-rata (mean) dan standar deviasi dari earnings management.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Pekanbaru yaitu terdiri dari 43 OPD. Peneliti menyerahkan 127 eksemplar kuesioner penelitian dari tanggal 09 Agustus 2022 kepada responden dengan tanggal pengembalian yang disepakati. Dari 127 kuesioner yang disebarkan 118 kuesioner diterima kembali, Namun terdapat 1 kuesioner yang tidak dapat dianalisis. Dengan kata

lain penelitian ini mempunyai response rate sebesar 92,13%, sehingga data yang dapat digunakan untuk di analisis sebanyak 117 kuesioner.

Dari 117 kuesioner yang dapat diolah, diketahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 62 orang (52,99%), dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 55 orang (47,01 %). Berdasarkan umur yaitu yang berumur 20 – 30 tahun berjumlah 5 orang (4,27%), yang berumur 31 – 40 tahun berjumlah 67 orang (57,26%) dan yang berumur 41 – 50 tahun berjumlah 45 orang (38,47%). Berdasarkan masa kerja yaitu 1 – 2 tahun tidak ada, 3 – 4 tahun sebanyak 23 orang (19,66%), dan >5 tahun sebanyak 94 orang (80,34%). Kemudian berdasarkan latar belakang pendidikan yang latar belakang D3 tidak ada, S1 sebanyak 77 orang (65,81%) dan S2 sebanyak 40 orang (34,19%).

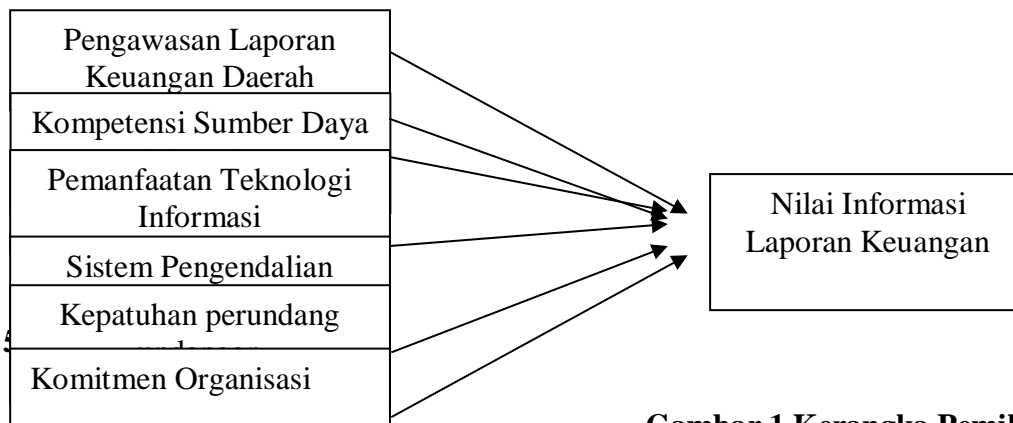
Gambar dan Tabel

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Nilai Informasi Laporan Keuangan (Y)	0.788	Reliabel
Pengawasan Keuangan Daerah (X ₁)	0.896	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₂)	0.853	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃)	0.928	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₄)	0.790	Reliabel
Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan (X ₅)	0.787	Reliabel
Komitmen Organisasi (X ₆)	0.912	Reliabel

Sumber : Data olahan peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas variabel independen dan dependen menunjukkan bahwa koefisien *cronbach alpha* > 0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran.

6. KESIMPULAN

1. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
2. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap nilai Informasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan semakin bagus Pengawasan Keuangan Daerah yang dilakukan maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Pekanbaru yang di hasilkan.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Nilai Informasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan jika Kompetensi Sumber Daya Manusia yang di miliki para pegawai bagus maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Pekanbaru yang di hasilkan.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Nilai Informasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan jika Teknologi informasi yang ada di dimanfaatkan dengan baik oleh para pegawai maka nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Pekanbaru yang di hasilkan.
5. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap Nilai Informasi laporan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang bagus di dalam suatu instansi, maka suatu instansi tersebut akan dapat menghasilkan laporan yang bagus dan berkualitas.
6. Kepatuhan terhadap perundang undangan berpengaruh terhadap Nilai Informasi laporan keuangan. Dengan patuhnya para pegawai di instansi terhadap peraturan perundang-undangan dalam membuat laporan keuangan, maka nilai informasi Laporan Keuangan yang akan di hasilkan baik pula.
7. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap Nilai Informasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan jika tiap-tiap individu memiliki komitmen yang tinggi terhadap tempat dia bekerja maka, yang menjadi tujuannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru akan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2008. *Partisipasi penganggaran dan bisnis perbedaan dan isu-isu penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Agoes, S. 2008. *Auditing (pemeriksaan Akuntansi)* oleh kantor akuntan public. Edisi ketiga cetakan keempat. Lembaga penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Jakarta. Jakarta
- Argo, Trihapsoro. 2015. *“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Bambang, Riyanto. 2012. *Dasar-dasar Pembelanjaan*. Edisi 4, Yogyakarta: BPFE
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darwin, Khadijah. 2020. *Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Drs. S. Munawir. 2010. *Analisis laporan Keruangan*. Yogyakarta: Liberty
- Endrianto, W. *Analisis Pengaruh Penerapan Basel dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen risiko pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Fatchurrochman, Agam. 2002. *Manajemen Keuangan Publik, Materi Pelatihan anti korupsi, Indonesian cooption watch*. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2014. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Girsang, H. A., & Yuyeta, E. N. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Journal Undip, Vol. 4 (No 4): hlm 1-11
- Greenberg and Baron, 2013, *Behavior in Organizations understanding and managing the human side of work*, printice-Hall International, New Jersey.
- Handayani, W. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Bayu media*. Malang
- Hery. 2013. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: PT. Grasindo
- Hutapea, Parulin dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus: Teori, Desai, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Gramedia Pusaka Utama: Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntansi Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Landary, Ni Wayan Dewi. 2018. *Pengaruh pengawasan keuangan, sumber daya manusia, Teknologi informasi, dan pengendalian intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan*. Universitas Warmadewa.
- Luthans, F.2011.*Perilaku Organisasi*. Edisi sepuluh. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mansur, Fitriani, Dkk. 2017. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Jambi.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Martini, dwi Dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah*: Salemba Empat. Jakarta
- Rifandi,M. (2018). *Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Daerah*. *Relasi, Jurnal Ekonomi*, 14(2).
- Soekidjan. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugijanto. 2002. PerananSistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. *Lintasan Ekonomi*. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50-66
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, R. A. 2018. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: UGM PRESS
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber daya manusia edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Swardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Bpfe. Yogyakarta.
- Thebora, Patras, Dkk. 2017.*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPK-AD Kantor Walikota Manado*. Universitas Sam Ratulangi.
- Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja. Edisi Kelima*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zeyn, Elvira. 2011 “*Pengaruh Good Governmance Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Pemoderasi*”. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Bandung: Universitas Pasundan Bandung